

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak tahun 1960, Korea Selatan mulai mengalami kurangnya populasi penduduk atau krisis demografi. Isu ini telah menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Korea Selatan hingga era pemerintahan Moon Jae In karena belum ditemukan penyelesaian yang efektif untuk menangani krisis tersebut. Krisis demografi yang terjadi di Korea Selatan disebabkan oleh kurangnya penduduk usia produktif di Korea Selatan. Hal tersebut dapat terjadi karena biaya hidup yang tinggi, jam kerja yang panjang ditambah lagi dengan gaya hidup yang kompetitif membuat mereka enggan untuk memiliki keturunan (Quick, 2019).

Krisis demografi di Korea Selatan disebabkan karena Korea Selatan tengah mengalami periode *Total Fertility Rates* (TFR) ultra-rendah (atau 'terendah-rendah') di bawah 1,3. Dalam empat dekade, Korea Selatan telah mengalami transisi yang cepat dari negara dengan tingkat kesuburan tinggi menjadi negara dengan tingkat kesuburan terendah secara global. Periode TFR turun dari 6,3 pada 1955-1960 menjadi tingkat sub-penempatan pada tahun 1984, dan kemudian ke tingkat terendah-rendah, di bawah

1,3, sejak tahun 2001, dan terendah di 1,08 pada tahun 2005. Sejalan dengan penurunan kesuburan yang bergerak cepat, “Transisi penundaan” telah terjadi sejak awal 1980-an, dengan angka umur pernikahan dan kelahiran bergeser ke usia yang lebih tinggi. Akibatnya, usia rata-rata ibu pada kelahiran pertama telah meningkat lebih dari enam tahun, mencapai 31 tahun pada 2014 yang merupakan level tertinggi di antara negara-negara besar secara global (Yoo, 2018).

Sejak tahun 2006 pemerintah telah menghabiskan dana sekitar 152.9 triliun won (\$135.65 miliar) untuk subsidi keluarga dan anak sejak lahir hingga masuk ke jenjang universitas (Ramstad, 2019). Kemudian, pada masa pemerintahan Park Geun Hye pada tahun 2016, Park Geun Hye meluncurkan website yang memberikan data statistik wanita usia subur, data pernikahan dan kelahiran dari tiap kota dan wilayah. Strategi tersebut dilaksanakan Park Geun Hye dengan harapan meningkatkan persaingan dalam hal reproduksi antar wilayah. Strategi tersebut tidak berujung baik dengan ditutupnya website tersebut karena keluhan wanita di Korea Selatan yang menganggap Park Geun Hye hanya melihat wanita sebagai “pabrik pembuat bayi” (Roh J. , 2019).

Strategi dan dana yang diberikan oleh presiden sebelumnya tidak memberi efek perbedaan terhadap krisis demografi di Korea Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang

dirilis pada Maret tahun 2019 oleh Statistik Korea yang melaporkan bahwa populasi di Korea Selatan dapat mencapai puncaknya pada sekitar 51 Juta tahun 2019, sebelum turun seperti pada tahun 1972 pada angka sekitar 34 Juta pada tahun 2067. Pada tahun 2017 hanya 14% populasi Korea Selatan yang berusia 65 tahun keatas. Proporsi penduduk usia kerja pada umur 15-64 tahun adalah 73%, tetapi angka tersebut dapat menyusut menjadi hanya 46% pada tahun 2065 menempatkan penduduk usia kerja di Korea Selatan di bawah rasio Jepang yaitu 51% (Fensom, 2019).

Terus menurunnya populasi di Korea Selatan memiliki implikasi jangka panjang. Dalam bidang ekonomi, kurangnya populasi penduduk di usia efektif menghadapkan Korea Selatan dengan tingkat kemiskinan usia tua tertinggi diantara negara lain di *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang kemudian menyebabkan Korea Selatan akan menghadapi tekanan pada keuangannya untuk membayar populasi yang menua dengan pekerja muda yang lebih sedikit untuk menanggung beban. Ketika populasinya mulai berkurang, potensi laju pertumbuhan ekonomi Korea Selatan juga akan mulai menurun. Menurut laporan baru-baru ini oleh *Moody's Investment Service*, efek dari pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan peningkatan utang akan mulai berdampak pada Korea Selatan

pada tahun 2030-an, dengan implikasi pada aspek kedaulatan jangka panjang Korea Selatan dan kekuatan fiskal. (Fensom, 2019)

Konsekuensi dari penurunan populasi tidak hanya berakibat dalam bidang pendidikan dan ekonomi saja, Korea Selatan saat ini memiliki salah satu militer terbesar di dunia dengan jumlah 600.000 tentara (Stangarone, 2018). Namun, karena jumlah laki-laki muda yang memenuhi syarat untuk layanan militer menyusut, Korea Selatan akan ditekan untuk mempertahankan struktur militernya saat ini. Jumlah penduduk laki-laki Korea Selatan yang mampu mendaftar di militer diperkirakan akan turun menjadi 225.000 pada tahun 2025, sebelum turun menjadi 161.000 pada tahun 2038. Hal tersebut akan memberikan tekanan kepada Korea Selatan dalam menciptakan keamanan Negara dari sekutu seperti Amerika Serikat yang saat ini memiliki sekitar 28.500 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan. (Xinhua, 2019)

Sebagai negara dengan jumlah pendapatan terbesar ke-empat di Asia setelah Jepang, China dan India krisis demografi tersebut tentu saja dapat mengancam eksistensi Korea Selatan di mata dunia. Menurut Hong Nam Ki, Menteri Ekonomi dan Keuangan krisis demografi yang dihadapi Korea Selatan menimbulkan ancaman besar yang merusak potensi pertumbuhan Korea Selatan dan pertumbuhan berkelanjutan (Asianews, 2019). Sejak menjabat

sebagai presiden pada tahun 2017, Moon Jae In ditekan dengan urgensi penyelesaian krisis demografi di Korea Selatan. Strategi Moon Jae In dalam menyelesaikan permasalahan demografi di Korea Selatan yang belum dapat terselesaikan menarik penulis untuk membahas lebih dalam mengenai strategi apa yang dilaksanakan oleh Presiden Moon Jae In dalam menghadapi krisis demografi di Korea Selatan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana strategi Presiden Moon Jae In dalam menyelesaikan krisis demografi di Korea Selatan?”

### **C. Kerangka Teoretik**

#### **1. Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*)**

Pendekatan teori pembangunan manusia dalam pembangunan internasional dikembangkan oleh Mahbub Ul Haq dengan didasari oleh karya dari Amartya Sen dalam *Development as Freedom* yang membahas tentang kemampuan atau kapabilitas manusia. *Human development* atau pendekatan pembangunan manusia memberikan penjelasan bahwa proses pembangunan, khususnya pembangunan internasional merupakan proses melalui

peningkatan kualitas kehidupan manusia bukan hanya sekedar meningkatkan perekonomian suatu negara. Pendekatan ini berfokus pada manusia, kesempatan dan pilihan yang dimilikinya. *Human development* berasumsi bahwa memperbaiki atau meningkatkan kehidupan manusia akan lebih membawa dampak kesejahteraan dan kemakmuran dibandingkan dengan hanya meningkatkan kemampuan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi saja. Teori pembangunan manusia percaya bahwa pertumbuhan pendapatan hanyalah salah satu alat yang digunakan untuk membangun dan membentuk kehidupan manusia, bukan sebagai tujuan dari pembangunan (UNDP, *About Human Development*, 2015).

Teori ini kemudian dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita (UNDP, *Human Development Report*, 1990). Sejumlah premis dasar dari teori pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara

keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan untuk mencapai pembangunan.

Amartya Sen mengatakan bahwa pembangunan ekonomi sudah seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses perluasan dari kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat. Ia mengamati bahwa masalah riil dari Negara yang sedang membangun adalah menurunnya kualitas kehidupan daripada rendahnya pendapatan. Ketika suatu negara mengalami transisi perubahan ekonomi, aspek lainnya juga akan mengikuti transisi perubahan tersebut. Kasus tersebut terjadi di Korea Selatan, dimana Korea Selatan mengalami transisi demografi. Transisi demografi sendiri artinya populasi yang tidak stabil ketika suatu negara menjadi lebih kaya

(Quick, 2019). Walaupun pendapatan di Korea Selatan membaik, tapi kualitas hidup masyarakatnya belum tentu ikut membaik.

Sesuai dengan teori pembangunan manusia, pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi saja tapi juga berfokus pada pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai skala pembangunan yang lebih baik. Hal tersebutlah yang menjadi poros Moon Jae In untuk mengatasi krisis demografi di Korea Selatan, yaitu dengan mencoba untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disana.

Strategi yang dilaksanakan Moon Jae In didasari oleh 2 dimensi yang dicakup oleh *human development*. Dimensi yang dicakup oleh *human development* dibagi menjadi 2 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu secara langsung meningkatkan kemampuan manusia yang meliputi indeks harapan hidup, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dimensi yang kedua yaitu menciptakan kondisi untuk pembangunan manusia yang meliputi partisipasi dalam ranah politik, ketahanan lingkungan, perlindungan dan hak asasi manusia, serta kesetaraan gender. Jadi secara keseluruhan, *human development* mencoba untuk membentuk pembangunan yang berorientasi pada manusia. Setelah semua hal tersebut tercapai dalam pembangunan, maka akan terbuka



kesempatan untuk meraih kemajuan pada aspek hidup lainnya.

## **2. Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan (*People Centered Development Concept*)**

*People centered development* atau pembangunan berwawasan kependudukan merupakan suatu konsep yang dicetuskan dalam *International Conference on Population and Development (ICPD)*. Konferensi ini digagas oleh *United Nations Population Fund (UNFPA)* di Kairo, Mesir pada 5-13 September 1994. ICPD merupakan hal yang bersejarah dalam permasalahan kependudukan dan pembangunan dunia. Sebanyak 179 perwakilan negara menyepakati sebuah dokumen yang dijadikan dasar aksi atau program dalam mencapai tujuan konferensi ini. Tujuan utama konferensi ini diantaranya adalah : 1. Membarikan akses terbuka bagi keluarga berencana, hak-hak reproduksi, serta kesehatan reproduksi dan seksual (SRH). 2. Menciptakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. 3. Menanggulangi dampak individu, sosial, dan ekonomi dari migrasi. 4. Mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), termasuk isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan perubahan

populasi. Dokumen ICPD sendiri terdiri dari 15 pasal yang selanjutnya dijabarkan menjadi 16 POA (*Plane of Actions*) yang dirincikan dalam 44 dimensi. Dokumen tersebut dilakukan evaluasi setiap 10 tahun sekali yaitu pada 2004 dan 2014. Evaluasi tersebut dilakukan karena keadaan dunia selalu berubah. Oleh karena itu isi dari dokumen ICPD perlu menyesuaikan. (Tjiptoherijanto, 2010)

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah konsep dimana penduduk merupakan sentral pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek. Sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebagai objek, penduduk juga harus dapat menikmati pembangunan yang bersangkutan. Konsep kebijakan pembangunan ini terdiri dari *population responsive policy* (kebijakan pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan), dan *population influencing policy* (kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang diinginkan). (Tjiptoherijanto, 2010) Contoh konsep *population-responsive policy* yang mampu diaplikasikan di Korea Selatan adalah: 1. Jumlah populasi remaja

harus direspon oleh pemerintah dengan program pendidikan dan kesehatan reproduksi remaja 2. Penduduk lansia dengan jumlah besar direspon dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. 3. Menciptakan kesetaraan gender pada lingkungan pekerjaan.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritik yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengajukan hipotesa terkait strategi Presiden Moon Jae In dalam mengatasi krisis demografi. Kebijakan Presiden Moon Jae In dalam mengatasi krisis demografi adalah:

1. Menitikberatkan pada pendekatan *human resources* untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup setiap generasi seperti dengan mereformasi struktur kekuatan militer sehingga lebih berpusat pada teknologi.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang ramah tenaga kerja perempuan dengan cara seperti meminimalisir halangan untuk memperkerjakan perempuan.
3. Meningkatkan jumlah kuota tenaga kerja migran di Korea Selatan.

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan krisis demografi di Korea Selatan hingga kepemimpinan Presiden Moon Jae In.
2. Menganalisa strategi Presiden Moon Jae In dalam mengatasi krisis demografi di Korea Selatan.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi fokus pembahasan menjadi lebih spesifik, penulis menganalisis strategi pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis demografi pada era Moon Jae In yaitu sejak Moon Jae In diangkat menjadi Presiden Korea Selatan pada tahun 2017.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini adalah dengan metode kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif-deskriptif digunakan untuk menjelaskan strategi pemerintah Korea Selatan di era Moon Jae In dalam menyelesaikan krisis demografi dan menggunakan metode akumulasi sekunder untuk mendukung kredibilitas penelitian.

Dalam pengertiannya, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010, hlm.4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Sementara itu, metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011, hlm. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam metode deskriptif-kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan metode akumulasi sekunder (*secondary accumulation method*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi dari berbagai literature seperti jurnal, buku, buku elektronik (*e-book*), Koran, majalah, notasi, dan lain-lain. (Nassaji H. , *Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis* , 2015)

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bagian yang saling berhubungan, yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoretik, hipotesis, metode penelitian, manfaat penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika skripsi.

### **BAB II: Dinamika dan Latar Belakang Krisis Demografi di Korea Selatan**

Bagian ini membahas tentang krisis demografi yang terjadi di Korea Selatan dimulai dari dinamika krisis demografi di Korea Selatan sejak tahun 1990 serta sebab dan akibat krisis demografi di Korea Selatan.

### **BAB III: Strategi Presiden Moon Jae In dalam mengatasi krisis demografi di Korea Selatan**

Bagian ini berisi tentang penjelasan secara rinci mengenai strategi pemerintah Korea Selatan di era Presiden Moon Jae In dalam rangka mengatasi krisis demografi di Korea Selatan.

### **BAB IV: Kesimpulan.**

Bab IV sebagai penutup menjelaskan mengenai kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan yakni mengenai strategi presiden Moon Jae In dalam mengatasi krisis demografi di Korea Selatan sehingga menemui perkembangan dalam mengatasi krisis tersebut.